

Mengkritisi Ingatan Kolektif Bangsa



DOK.PRI

**YULIUS DWI
CAHYONO MPD**
Dosen Pendidikan
Sejarah USD

BELUM lama ini, tepatnya 9 Maret 2015, diadakan seminar "Orasi Kebangsaan II" di Fakultas Hukum UGM. Prodi Pendidikan Sejarah dan Prodi Sastra Sejarah Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta pun turut berpartisipasi di dalamnya.

Kegiatan ini mengambil tema "Mencermati Penyimpangan dan Pemutarbalikan Fakta Sejarah di Masa Penjajahan dan Rencana Penulisan Sejarah Nusantara & Indonesia Baru." Sebagai narasumber utama adalah Bapak Batara R Hutagalung, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), dan Dr Purwanto MA (USD); *Keynote Speak* disampaikan oleh Bapak Tedjo Edhi Purdijanto selaku Menko Polhukam.

Seminar ini juga bertujuan untuk membangkitkan kembali ingatan kolektif bangsa yang semakin melemah. Dalam pidatonya Menko Polhukam antara lain menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, perlu mengkaji ulang penulisan sejarah yang ada selama ini.

Kedua, sejarah perlu diluruskan agar generasi penerus bangsa dapat memahami sejarahnya dengan benar. Pemahaman sejarah ini akan berpengaruh terhadap karakter bangsa mengingat materi pelajaran sejarah diberikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi akan mempengaruhi sikap dan karakter generasi penerus bangsa yang kelak menjadi pemimpin negara.

Ketiga, bahwa menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ancaman terhadap kedaulatan bangsa sifatnya sudah multi dimensional.

Melalui pidatonya Menko Polhukam juga berharap tim pelurusan sejarah dan penulisan sejarah Nusantara dan Indone-

■ Bersambung ke Hal 11

TribunOpini menerima kiriman artikel opini tentang beragam isu populer lokal, regional, maupun nasional. **TribunOpini** tayang setiap Selasa, Rabu, dan Jumat. Panjang artikel 3.000 karakter atau sekitar 525 kata. Kirim naskah via email : tribunopini@gmail.com, sertakan foto dan identitas diri Anda.



sia Baru segera terbentuk, dan diangkat secara nasional. Hal ini semakin memberikan harapan bagi Indonesia, yang saat ini dapat dikatakan mengalami krisis ingatan kolektif bangsa dan tercemarnya ingatan kolektif dengan sejarah yang tidak benar. Sejarah pun menjadi terlupakan dan dirasa tidak penting.

Melalui penghargaan akan ingatan kolektif dan upaya pelurusan sejarah, kita dapat membetengi bangsa ini dari berbagai ancaman atas kedaulatan bangsa yang bersifat multidemensional. Contoh kasus yang masih hangat adalah kasus hukuman mati terhadap para pengedar narkoba di Indonesia dari Brazil, Belanda, dan Australia. Pengedaran Narkoba adalah sebuah kejahatan besar, karena mampu membinasakan kualitas generasi mudab angsa. Sebuah negara akan hancur ketika generasi muda rusak kualitasnya karena Narkoba.

Tindakan Indonesia untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap para pengedar tersebut, selalu dituding melanggar hak asasi

manusia (HAM) oleh Belanda, Brazil, dan Australia. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mempengaruhi keputusan Indonesia dalam menjatuhkan hukuman mati.

Salah satu contoh upaya dari Australia yang masih hangat dalam ingatan adalah adanya tawaran pertukaran narapidana. Hal ini sungguh sangat meremehkan Indonesia. Melalui ungkapan lain dapat dikatakan kedaulatan kita dijadikan ajang barter. Lalu mengapa dunia juga terdiam ketika banyak warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi hukuman mati di negara lain?

Bangsa Indonesia telah sesuai dengan prosedur dalam menjatuhkan eksekusi mati tersebut. Jika dilihat dari sejarahnya, semisal kasus genosida yang dilakukan oleh Belanda dalam kasus Westerling di Imana ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan dibantai tanpa proses hukum, dalam hal ini bangsa Belanda jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM berat.

Mengapa Belanda begitu berani mengatakan kita melanggar

HAM dalam kasus eksekusi mati para pengedar narkoba tersebut? Hal ini menandakan bahwa kedaulatan kita diremehkan oleh mereka.

Menurut Bapak Batara, Belanda paling takut ketika kasus Westerling diangkat karena merupakan kasus kekejaman luar biasa yang dilakukan Belanda. Dalam kasus seperti ini PBB tidak mengenal asas kadarluarsa sehingga kasus ini tetap dapat diperkarakan.

Dalam kasus ini kita seharusnya sadar bahwa dengan membuka lembaran sejarah secara benar dan objektif, dapat menyelamatkan kedaulatan bangsa dan mampu memberikan dasar yang kuat bagi para pemimpin bangsa dalam mengambil setiap keputusan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu ingatan kolektif bangsa harus selalu dijaga dan dikritisi demi masa depan bangsa. Sejarah sungguh memiliki kontribusi positif dalam menjaga kedaulatan bangsa. (*)